

**MANAJEMEN KURIKULUM DI SEKOLAH DASAR
DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

**CURRICULUM MANAGEMENT IN ELEMENTARY SCHOOLS IN THE
DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION**

Agung Setiawan¹, Dien Nurmarina Malik Fadjar², Sholehuddin³

Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Jakarta

asagung134@gmail.com¹, dienmalik@umj.ac.id², sollehuddin@umj.ac.id³

ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar perlu adanya manajemen terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan model perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah dasar inklusif Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini, bahwa perencanaan yang dilakukan sekolah dasar negeri yaitu merencanakan desain kurikulum yang berlaku di sekolah reguler dan belum menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Semua anak normal dan anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang sama. Perencanaan jumlah siswa perkelas dan rombongan belajar tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, pembagian tugas mengajar tidak sesuai antara kualifikasi dengan kompetensi. Sedangkan, di sekolah dasar swasta setiap program kerja memiliki penanggung jawab masing-masing dan tidak merangkap tugas. Pelaksanaan yang dilakukan oleh sekolah dasar negeri belum memenuhi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sementara itu, pelaksanaan kurikulum di sekolah dasar swasta sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat dari program-program yang direncanakan terlaksana dengan baik. Evaluasi yang dilakukan di sekolah dasar negeri sudah berjalan, akan tetapi evaluasi belum maksimal. Di sekolah dasar negeri, pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap enam bulan sekali. Sedangkan evaluasi yang dilakukan sekolah dasar swasta dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Kata Kunci: *Kurikulum, Sekolah Dasar, Inklusif*

ABSTRACT

The implementation of inclusive education in elementary schools requires management related to planning, implementation, and evaluation. Researchers used qualitative methods with the aim of uncovering and describing the curriculum planning, implementation, and evaluation models used in inclusive elementary schools in South Tangerang City. The results of this study indicate that the planning carried out by public elementary schools is to design a curriculum that applies in regular schools and has not adapted to student characteristics. All normal children and children with special needs use the same curriculum. The planning of the number of students per class and learning groups does not comply with regulations that have been set by the government, the division of teaching tasks does not match qualifications with competencies. Meanwhile, in private elementary schools, each work program has its own person in charge and no overlapping duties are held. Implementation in public elementary schools has not yet met the success indicators for inclusive education. Meanwhile, curriculum implementation in private elementary schools has been well-executed. This is evident in the successful implementation of planned programs. Evaluations in public elementary schools have been ongoing, but they have not been optimal. In public elementary schools, evaluations are conducted every six months, while in private elementary schools, evaluations are conducted every three months.

Keywords: *Curriculum, Elementary School, Inclusive*

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 1). Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal (Dadan Rachmayana, 2013: 89). Lebih lanjut M. Takdir Ilahi, mengemukakan bahwa pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang merepresentasikan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara (Mohammad Takdir Ilahi, 2013: 24). Sedangkan Stubbs berpendapat terkait pendidikan inklusif, bahwa setiap anak itu berbeda, setiap anak dapat belajar, dengan cara mengubah sistem agar sesuai dengan anak (Stubbs, 2002: 48). Dengan demikian, bahwa dalam proses pendidikan inklusif harus memperhatikan kebutuhan anak, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat, yaitu: Pertama landasan religius, sebagai bangsa yang beragama dan mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan agama. Allah Swt, menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang satu sama lainnya berbeda. Allah Swt, menciptakan manusia berbeda satu sama lain dengan maksud agar dapat saling berinteraksi dalam rangka saling tolong-menolong, *"Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal"* (QS. Al-Hujurat, 49:13).

Kedua landasan filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang dibangun atas dasar bhineka tunggal ika. Bertolak pada falsafah tersebut, bahwa kelainan fisik dan psikis hanyalah salah satu bentuk perbedaan untuk disatukan dalam sebuah sistem pendidikan agar terjadinya interaksi serta sikap saling toleransi. Pendidikan tersebut juga merupakan hak bagi semua orang yang artinya pendidikan dilaksanakan tidak memandang perbedaan orang baik itu dari sudut pandang agama, ras, suku, fisik maupun bangsa. Dari perhal fisik ini, pada kenyataannya tidak semua orang mampu memperoleh pendidikan dengan baik. Hal inilah yang dialami oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Ketiga landasan yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) yang tertulis bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 34, bahwa setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak normal dalam pendidikan. Selama ini, tidak sedikit kalangan masyarakat yang belum menerima secara positif kehadiran anak berkebutuhan khusus tersebut. Sebagian dari mereka masih memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar perlu adanya manajemen yang baik terkait kurikulum. Manajemen kurikulum, yaitu terkait dengan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Lebih lanjut Rusman, mengemukakan bahwa manajemen kurikulum adalah sebagai usaha sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum (Rusman, 2012: 3). Manajemen kurikulum sangat diperlukan dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan inklusif. Hal tersebut, sangat membantu lembaga pendidikan inklusif dalam merumuskan perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang sekolah dasar inklusif dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Deddy Mulyana (2001: 150) metode penelitian kualitatif, yaitu jenis metode penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik dan bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya. Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2009: 4) berpendapat, bahwa penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan dengan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Peneliti dalam melakukan uji validitas data penelitian ini, yaitu dengan pengukuran derajat kepercayaan data. Adapun teknik yang digunakan dalam uji ini, adalah dengan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai waktu. Jadi dalam penelitian ini, akan menjelaskan dan mengungkapkan model kurikulum yang diterapkan dalam program pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri dan swasta inklusif Kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Kurikulum

Manajemen sangat diperlukan dalam mengelola suatu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki arah tujuan jika memiliki konsep manajemen yang baik. Rohiat (2010: 14) manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Engkoswara dan Aan Komariah (2012: 87) manajemen merupakan suatu proses yang berkelanjutan bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Husaini Usman (2013: 6), manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah yang meliputi perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengawas atau evaluasi, dan sistem informasi sekolah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola suatu organisasi dalam hal ini sekolah. Manajemen tersebut memiliki fungsi-fungsi yaitu

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum. Nasution (2014: 9) memiliki beberapa pendapat terkait kurikulum. Pertama, kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum. Kedua, kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ketiga, kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. Keempat, kurikulum sebagai pengalaman siswa, yakni secara aktual menjadi kenyataan pada setiap siswa.

Oemar Hamalik (2012: 16) juga memiliki beberapa pendapat terkait konsep kurikulum. Pertama, kurikulum memuat isi dan materi pelajaran, yaitu bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang ahrus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, yaitu kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang disediakan untuk proses kegiatan pembelajaran siswa. Ketiga, kurikulum sebagai pengalam belajar, yaitu bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman belajar. Selanjutnya Ahmad Tafsir berpendapat bahwa kurikulum merupakan pengalaman belajar yang mempengaruhi pendewasaan anak (Ahmad Tafsir, 2010: 53). Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dede Rosyada (2013: 31) berpendapat bahwa, kurikulum tidak cukup hanya yang tertulis saja (*written curriculum*), tetapi juga *hidden curriculum* yang secara teoritis sangat rasional mempengaruhi siswa, baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah secara lebih luas dan perilaku dari semua komponen sekolah dalam hubungan interaksi vertikal dan horizontal. Selanjutnya Dede Rosyada (2013: 31) merumuskan pendapat Doll, Taba, dan Gagne tentang kurikulum, bahwa kurikulum adalah pengalaman-pengalaman belajar yang ditawarkan sekolah pada siswa. Lingkungan, kultur, dan kebijakan sekolah yang berpengaruh terhadap siswa.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum dokumen satuan pendidikan yang perlu diaktualisasikan. Kurikulum berisikan tujuan, materi, metode, dan penilaian yang digunakan sebagai acuan pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum (Rusman, 2012: 2). Selanjutnya Dinn Wahyudin (2014: 18) berpendapat bahwa manajemen kurikulum pada umumnya adalah mengotak-atik mata pelajaran dalam kurikulum, mengubah dan memperbaiki tujuan dan menambahkan atau mengurangi muatan belajar. Sementara itu, Oemar Hamalik (2012: 20) menyatakan bahwa studi manajemen kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, dan perbaikan kurikulum. Jika berbicara tentang manajemen kurikulum, maka akan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Dede Rosyada (2017: 65) berpendapat bahwa dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan harus dilakukan dalam dua tahap, yakni kurikulum di tingkat sekolah disusun bersama-sama oleh para guru dengan kepala sekolah masing-masing dan kurikulum operasional untuk setiap mata pelajaran disusun oleh masing-masing guru.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, bahwa manajemen kurikulum adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk mempermudah mengelola pendidikan dalam kegiatan

pelaksanaan proses pembelajaran, yang di mulai dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi, agar program berjalan dengan baik dan terarah. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tingkat pusat. Oleh karena itu, level sekolah yang paling tinggi adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum dengan kegiatan pembelajaran pada setiap tingkat satuan pendidikan. Selain itu, sekolah juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat. Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum baik kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal. Kurikulum tersebut, dapat diwujudkan melalui proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan institusional dan nasional.

Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, yang digunakan dalam mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan ke dalam program sekolah (J.David Smith, 2006: 45). Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (O'Neil 1994). Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa dengan bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback dan Sianback, 1990). Staub dan Peck (1995) mendefinisikan pendidikan inklusif merupakan penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Setiap siswa sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Semua siswa dalam program pendidikan inklusif akan mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah, yang membedakan yaitu siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus. Pendidikan inklusif mengajarkan tentang keberagaman dan sikap toleransi antar siswa. Di mana siswa harus saling menghargai perbedaan fisik antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Meskipun siswa berkebutuhan khusus memiliki kekurangan fisik, namun di sisi lain mereka pasti memiliki kelebihan dibandingkan siswa reguler. Selain itu, siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tidak mendapatkan perlakuan khusus dari guru kelas, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas tersebut. Hanya saja siswa berkebutuhan khusus akan mendapat pengawasan dari guru pendamping khusus yang disediakan oleh sekolah atau dinas pendidikan.

Kurikulum Pendidikan Inklusif

Handojo berpendapat bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak dapat disamakan dengan pendidikan normal, karena kelainnya sangat bervariasi. Cara penatalaksanaannya sangat jauh berbeda dengan pendidikan normal (Handojo, 2008: 33). Oleh karena itu perlu adanya kurikulum pendidikan inklusif. Hidayat (2006: 13) bahwa dalam sistem pendidikan inklusif diperlukan kurikulum yang fleksibel yang berbasis kompetensi, yang mampu mengakomodasi kebutuhan semua anak dan menstimulasi prestasi

belajar secara optimal. Dadang Garnida berpendapat bahwa desain kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif harus mempertimbangkan dua hal, yaitu karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Penyusunan kurikulum di sekolah inklusif bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar. terdapat tiga model kurikulum, yaitu model kurikulum sekolah reguler, kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi, dan kurikulum yang diindividualisasikan (Dadang Garnida, 2015: 108). Pada model kurikulum reguler, anak berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum umum, sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Model kurikulum reguler yang dimodifikasi, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum perpaduan antara kurikulum umum dengan kurikulum pembelajaran individual. Model kurikulum individual, anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum diindividualisasikan, yang dalam format program pembelajaran individual. Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, kurikulum ini sering disebut program pembelajaran individual, yang dikembangkan secara khusus oleh guru dan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi (Dadang Garnida, 2015: 108).

Tarmansyah (2007: 154) menjelaskan bahwa hendaknya sekolah yang harus menyesuaikan kurikulum dengan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Duplikasi kurikulum, siswa berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok untuk siswa tunanetra, tunarungu tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan intelegensi. Namun demikian perlu memodifikasi proses, yakni siswa tunanetra menggunakan huruf Braille, dan tunarungu, tunawicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampiannya.
2. Modifikasi kurikulum, kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada siswa tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas (*eskalasi*) untuk siswa cerdas dan berbakat (*gifted and talented*).
3. Substitusi kurikulum, yaitu beberapa bagian kurikulum siswa rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk siswa berkebutuhan khusus dengan melihat situasi dan kondisinya.
4. Omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata.

Model – Model Pendidikan Inklusif

Mudjito (2012: 32) mengelompokkan kelas inklusif dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Kelas reguler penuh Siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler (normal). Guru pembimbing khusus di kelas reguler membimbing siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler dengan menggunakan kurikulum standar nasional.
2. Kelas khusus di sekolah reguler Kelas khusus merupakan salah satu layanan di sekolah inklusif, dengan cara memisahkan siswa berkebutuhan khusus di kelas tersendiri dari siswa reguler.

Vaughn, Bos dan Schumn dalam Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2008: 6), penempatan siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus di sekolah inklusif di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai model, yaitu:

1. Kelas reguler “*full inclusion*” Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif sepanjang hari dengan menggunakan kurikulum yang sama dengan yang digunakan siswa pada umumnya.
2. Kelas reguler dengan “*cluster*” Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler/inklusif dalam kelompok khusus.
3. Kelas reguler dengan “*pull out*” Siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler atau inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler/inklusif ke ruang bimbingan atau ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus.
4. Kelas reguler dengan “*cluster*” dan “*pull out*” Siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler atau inklusif dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler atau inklusif ke ruang bimbingan atau ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus.
5. Kelas khusus pengintegrasian dengan berbagai Siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler atau inklusif; tetapi dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama siswa lain di kelas reguler atau inklusif.
6. Kelas khusus penuh Siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah reguler atau inklusif.

Perencanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Setiap sekolah memiliki program perencanaan, apalagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seharusnya lebih kuat lagi dalam hal perencanaan. Adapun perencanaan di SD Negeri, yaitu sekolah mempunyai perencanaan program pendidikan inklusif secara tertulis dalam bentuk program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, hanya saja masih menjadi satu kesatuan dengan program siswa reguler, belum terpisah secara jelas dan terperinci. Sementara itu, SD Swasta, terkait perencanaan program pendidikan inklusif. Perencanaan program pendidikan inklusif di SD Swasta, memiliki program yang jelas baik program jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, seharusnya sekolah memiliki penanggung jawab atau koordinator yang bertanggung jawab terhadap program pendidikan inklusif. SD Negeri, memiliki koordinator yang mengkoordinir pendidikan inklusif, yang menjadi koordinator merupakan guru kelas yang mendapat tugas tambahan sebagai koordinator sehingga koordinator tidak tergambar secara jelas dalam struktur organisasi sekolah. Sementara itu, di SD Swasta, memiliki koordinator program pendidikan inklusif yang tergambar jelas dalam struktur organisasi sekolah. Ketua yayasan dan kepala SD Swasta mengangkat dan menugaskan secara khusus untuk mengelola program pendidikan inklusif di sekolah ini. Jadi koordinator tidak merangkap dengan tugas yang lainnya.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga melakukan proses perencanaan dalam hal penerimaan siswa berkebutuhan khusus. Perencanaan penerimaan siswa berkebutuhan khusus memiliki beberapa komponen, yaitu perencanaan kriteria anak berkebutuhan khusus, perencanaan dalam melakukan identifikasi dan assesmen. SD Negeri, melakukan tes bagi siswa baru, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. tes hanya bertujuan untuk mengukur kemampuan awal siswa saja dan juga untuk siswa berkebutuhan khusus dan sekolah mewawancarai orang tua siswa berkebutuhan khusus terkait karakter anaknya. Kemudian untuk penerimaan siswa berkebutuhan khusus dibatasi

hanya pada kategori, tunagrahita ringan dan sedang, tunadaksa ringan dan sedang, tuna laras, anak yang memiliki potensi kecerdasan bakat dan istimewa, dan anak yang memiliki gangguan belajar. dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, yang terlibat yang koordinator dan guru kelas. SD Swasta juga melakukan perencanaan penerimaan siswa baru baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. SD Swasta juga menentukan kategori siswa berkebutuhan khusus dalam penerimaan siswa baru dan melibatkan pihak terkait dalam proses ini. Sekolah melakukan tes bagi siswa baru, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus, dalam penerimaan siswa baru melibatkan psikolog untuk pelaksanaan identifikasi dan assesmen. Di sekolah ini, ada namanya observasi, yaitu pihak sekolah melakukan identifikasi dan assesmen terhadap siswa yang ingin bersekolah, observasi tersebut juga melibatkan orang tua siswa di mana setiap orang tua siswa wajib hadir dalam observasi tersebut.

Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif

Implementasi dan pengembangan pendidikan inklusif tidak terlepas dari aspek kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, proses, dan cara penilaian untuk mencapai tujuan pendidikan baik institusional maupun nasional. Pengelolaan dan pengembangan kurikulum sangat penting, karena kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan suatu program. Kurikulum digunakan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan individual setiap siswa baik siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus.

Kurikulum yang digunakan di SD Negeri, yaitu menggunakan kurikulum kombinasi. SD Negeri, belum ada modifikasi kurikulum secara jelas dan terprogram, hanya saja dalam pelaksanaan dan evaluasi ada beberapa yang disesuaikan. SD Negeri terkait kurikulum belum ada modifikasi terhadap proses pembelajaran, kegiatan proses pembelajaran sama saja dengan anak normal lainnya. Hanya saja perhatian guru kelas yang lebih terhadap anak berkebutuhan khusus. Program evaluasi juga sama saja dengan anak normal lainnya, hanya bobot nilai anak normal dengan anak berkebutuhan khusus yang dibedakan. Sementara itu, di SD Swasta, menggunakan kurikulum yang fleksibel baik anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Sekolah melakukan modifikasi kurikulum, yaitu dengan menggunakan kurikulum *pullout* bagi anak berkebutuhan khusus, kemudian pihak yang terlibat dalam melakukan modifikasi kurikulum, yaitu kepala sekolah, semua guru baik guru kelas, guru pendamping dan guru mata pelajaran pun diikutsertakan, koordinator serta psikolog.

Proses penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar perlu adanya program pembelajaran individual. Program tersebut berguna untuk memberi arah pembelajaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa maka program yang diindividualisasikan terarah pada tujuan atas dasar kebutuhan dan sesuai dengan tahap kemampuannya saat ini. Selain itu program ini juga menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di SD Negeri, bahwa guru di sekolah ini tidak menyusun silabus, rencana pembelajaran, dan program individual khusus untuk masing-masing anak berkebutuhan khusus dengan alasan, terlalu banyaknya siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Selain itu, di sekolah ini juga tidak ada guru pembimbing khusus yang fokus menangani anak berkebutuhan khusus. Guru di sekolah ini, semuanya guru kelas yang bertugas tidak hanya fokus terhadap anak berkebutuhan khusus, akan tetapi juga bertanggung jawab dengan anak normal lainnya. Selanjutnya untuk program pembelajaran individual di SD Swasta sudah terlaksana. Sekolah membuat program pembelajaran individual, karena di sekolah memiliki guru pendamping khusus, setiap anak memiliki satu guru pendamping khusus.

Program pendidikan inklusif merupakan program pendidikan terbuka, tanpa membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Pada pelaksanaan

proses kegiatan belajar mengajar, anak berkebutuhan khusus dan anak reguler berada pada satu ruang kelas belajar bersama-sama. Guru juga tetap memberikan tugas kepada siswa berkebutuhan khusus. Sejalan dengan pernyataan tersebut, begitu juga SD Swasta juga tidak membedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya dalam hal memberikan tugas dengan kemampuan siswa tersebut. menyesuaikan Berdasarkan pengamatan penulis di SD Negeri, dalam satu kelas terdapat lebih dari 2 anak berkebutuhan khusus pada masing masing kelas. Proses pendampingan hanya dilakukan oleh satu guru, yaitu guru kelas dengan jumlah siswa sekitar 30 lebih dalam satu kelas. Guru kelas hanya memberikan perhatian lebih saja untuk anak berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk pendalaman materi, agar anak berkebutuhan khusus tidak tertinggal materi pelajaran, dilakukan program jam tambahan belajar. Akan tetapi, program tersebut hanya dikhususkan untuk kelas akhir, yaitu kelas enam yang akan mengikuti ujian nasional. Untuk jenjang kelas satu sampai kelas lima, belum terprogram secara jelas terkait tambahan belajar, karena kekurangan tenaga pendidik dan guru kelas, merasa sudah lelah menagani anak yang lumayan banyak dalam satu kelas.

Sementara itu, di SD Swasta guru menyediakan tambahan waktu khusus bagi siswa berkebutuhan khusus di luar jam pelajaran untuk memberikan materi tambahan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru pendamping di ruangan khusus, untuk mengejar materi pelajaran yang tertinggal dan menguatkan materi pembelajaran. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan berbeda-beda. Sekolah memiliki media dan alat pembelajaran khusus, seperti sarana untuk melatih motorik siswa agar tulisannya rapi, seperti bola besar untuk melatih kelenturan siswa, papan titian untuk keseimbangan siswa, kartu huruf untuk melatih keterampilan pengenalan huruf dan keterampilan membaca. Selanjutnya, setiap penyelenggara satuan pendidikan untuk mengukur kemampuan siswanya pada umumnya melakukan evaluasi. Di SD Negeri untuk evaluasi standar ketuntasan anak berkebutuhan khusus belum sesuai perencanaan, hanya koordinator dan guru kelas memberikan pengertian tentang bobot yang didapat oleh siswa berkebutuhan khusus, bahwa bobot nilai tujuh yang didapat siswa berkebutuhan khusus beda dengan bobot nilai yang didapat oleh siswa normal lainnya. Begitu juga dengan soal yang diberikan kepada anak bekebutuhan khusus, sudah disesuaikan dengan kemampuan siswa masingmasing, hanya saja secara detail dan terencana belum dibuat programnya. Untuk hasil belajar, sama saja dengan anak normal lainnya berupa rapor, hanya saja untuk anak berkebutuhan khusus, ditambahkan catatan kecil secara deskripsi di rapor siswa berkebutuhan khusus. SD Swasta, terkait ketuntasan minimal sama saja dengan anak normal lainnya. Tidak ada, perbedaan hanya saja bobotnya yang dibedakan.

Evaluasi Program Inklusif di Sekolah Dasar

Evaluasi harus dilakukan dengan tujuan untuk mengukur rencana yang telah direncanakan dan dilaksanakan apakah sudah mencapai tujuan yang diharapkan sekolah atau malah belum sesuai harapan. Pelaksanaan evaluasi di SD Negeri dilaksanakan setiap enam bulan sekali yaitu pada setiap akhir semester sebelum penerimaan rapor. Sementara itu, di SD Swasta dalam melaksanakan evaluasi, dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Evaluasi program pendidikan inklusif merupakan bagian dari fungsi manajemen. Dalam melakukan evaluasi seharusnya pihak sekolah membuat indikator yang perlu di evaluasi. Sehingga dengan indikator tersebut, terlihat program yang mana saja yang sudah dan belum terlaksana. Evaluasi di SD Negeri, belum menggunakan instrument baku dalam bentuk dokumen yang sudah valid. Instrument yang digunakan tersebut dibuat sendiri oleh kepala sekolah. Kemudian, hasil dari evaluasi digunakan untuk merancang program kerja dan merencanakan ulang program berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara itu, di SD Swasta dalam melakukan evaluasi program menggunakan instrument yang sudah valid dan sudah

disosialisasikan. Hasil dari tindak lanjut evaluasi, digunakan untuk merancang program kerja dan pengembangan program.

Setiap satuan pendidikan pasti melakukan evaluasi hasil belajar. Evaluasi tersebut bisa berupa evaluasi akhir semester, akhir tahun atau kenaikan kelas, ataupun evaluasi ujian akhir sekolah berupa ujian sekolah atau ujian nasional. Selanjutnya untuk evaluasi kegiatan pembelajaran di SD Negeri, bahwa setiap anak berkebutuhan khusus naik kelas, tidak ada yang tinggal kelas dan mengikuti ujian nasional. Setelah lulus anak berkebutuhan khusus juga memiliki ijazah yang sama dengan anak normal lainnya dan biasanya anak yang lulus dari sekolah ini, banyak yang melanjutkan ke jenjang pondok pesantren. Sementara itu, di SD Swasta, hampir sama dengan SD Negeri terkait evaluasi belajar. semua anak berkebutuhan khusus mengikuti ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, dan ujian nasional. Semua anak berkebutuhan khusus tidak ada yang tinggal kelas, semuanya naik kelas, dan mengikuti ujian nasional serta mendapatkan ijazah yang sama dengan anak normal lainnya serta anak berkebutuhan khusus juga melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Jika, siswa mampu di sekolah umum, maka orang tua melanjutkan ke sekolah umum, jika belum mampu biasanya orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah inklusif berdasarkan rekomendasi sekolah.

KESIMPULAN

1. Perencanaan yang dilakukan oleh sekolah dasar inklusi, dalam pengembangan pendidikan inklusif, yaitu merencanakan desain kurikulum yang berlaku di sekolah reguler dan menyesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Perencanaan jumlah siswa perkelas dan rombongan belajar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga berdampak optimalnya proses pembelajaran. Selanjutnya, merencanakan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun jadwal pembelajaran dan pembagian tugas mengajar. Dalam hal pembagian tugas terlihat sesuai antara kompetensi dengan kualifikasi. Kemudian menyusun pelaksanaan program kurikuler dan ekstrakurikuler, menyusun program penilaian, menyusun program kriteria kenaikan kelas, adanya program kemajuan belajar, dan adanya program perbaikan dan pengayaan pembelajaran.
2. Pelaksanaan yang dilakukan dalam pengembangan pendidikan inklusif, diketahui bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif sesuai indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Memodifikasi kurikulum nasional dengan kurikulum inklusif, yaitu pullout di mana siswa berkelainan atau berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain di kelas reguler atau inklusif, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik atau keluar dari kelas reguler ke ruang bimbingan atau ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru khusus atau guru pembimbing khusus. Selain itu, media dan sumber belajar yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran dan memiliki tenaga khusus, yaitu seorang psikolog.
3. Evaluasi yang dilakukan setiap tiga dan enam bulan sekali. Evaluasi meliputi desain kurikulum yang berlaku di sekolah reguler dan disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik siswa, perencanaan jumlah siswa perkelas dan rombongan belajar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, merencanakan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun jadwal pembelajaran dan pembagian tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan, menyusun pelaksanaan program kurikuler dan ekstrakurikuler, menyusun program penilaian, menyusun program kriteria kenaikan kelas, menyusun program kemajuan belajar, dan membuat program perbaikan dan pengayaan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 2010. *Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: Bumi Aksara
- Aqib, Zainal. 2010. *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendekia
- Azra, Azumardi. 2014. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Melenium III*. Jakarta: Prenamedia
- Bafadal, Ibrahim. 2012. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Baihaqi dan Sugiarmin. 2014. *Memahami dan Membantu Anak HDHD*. Bandung: Refika Aditama
- Budiyanto. 2017. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Prenadamedia
- Desmita. 2011. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik; Panduan Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Efendi, Mohammad. 2008. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Emzir. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Engkoswara dan Komariah, Aan. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama
- Handojo. 2008. *Autisma; Petunjuk Praktis & Pedoman Materi untuk Mengajar Anak Normal, Autis & Prilaku Lain*. Jakarta: Buana Ilmu Populer
- Hamalik, Oemar. 2011. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Bumi Aksara
- Hasan, Hamid. 2014. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hidayat, dkk. 2006. *Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: UPI Press
- Idi, Abdullah. 2011. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia
- Idrus, Ali dan Saudagar Fachruddin. 2011. *Pengembangan Profesionalitas Guru*. Jakarta: Gaung Persada
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif; Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pedoman Administrasi Kelas Pendidikan Khusus*. Jakarta: Luxima Metro Media
- Marthan, Lay Kekeh. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduouse Media
- Nasution. 2014. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nata, Abuddin. 2012. *Manajemen Pendidika; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Ni'matuzahroh dan Nurhamidah Yuni. 2016. *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif*. Malang: UMM Press
- Prasetyo. 2008. *Serba-Serbi Anak Autis; Mengenal, Menangani, dan Mengatasinya dengan Tepat dan Bijak*. Yogyakarta: Diva Press
- Rachmayana, Dadan. 2013. *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif*. Luxima Metro Media
- Rohiat. 2012. *Manajemen Sekolah*. Bandung: Refika Aditama
- Rosyada, Dede. 2013. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Rusman. 2012. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Sanjaya, Wina. 2015. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenadamedia
- Smith, J. david. 2006. *Inclusion School for All Students*. Bandung: Nuansa
- Stainback, W. and Sianback, S. 1990. *Support Network for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Paul H, Brooks
- Staub, D. & Peck, C.A. 1995. *What are the Outcomes for Nondisabled Students? Educational Leadership*. Baltimore: Paul H. Brooks
- Stubbs, Sue. 2002. *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. Oslo: The Atlas Alliance.
- Sukiman. 2015. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sukmadinata, Nana, Syaodih. 2014. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tafsir, Ahmad. 2010. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tarmansyah. 2007. *Inklusi Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas
- Tim Pengembang MKDP UPI Bandung. 2017. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Tony Attwood. 2005. *Sindrom Asperger; Panduan bagi Orang Tua dan Profesional*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Triani, Nani. 2012. *Panduan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta Timur: Luxima Metro Media
- Usman, Husaini. 2013. *Manajemen; Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyudin, Dinn. 2014. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Yamin, Mohammad. 2012. *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*. Yogyakarta: Diva Press